



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
Jalan Alun-alun Selatan No. 1 Purbalingga, Jawa Tengah, 53313
Telepon/Faksimile: (0281) 891026
Laman : rutanpurbalingga.kemenkumham.go.id , Surel : rrutanpurbalingga@yahoo.co.id

Nomor : W.13.PAS.PAS.41-PR.04.04-001 4 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
Jalan Dr. Cipto No.64, Semarang
Jawa Tengah, 50126

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W.13-PR.04.02-296 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami buat untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Biuri Wijaksono

NIP. 197402081997031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan *Good Governance*, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2023. LKjIP tahun 2023 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

LKjIP ini memberikan gambaran tentang progress terlaksananya kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2020-2025. Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.



Purbalingga, 31 Desember 2023

Kejaja,

Biuri Wijaksono

NIP. 197402081997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu bentuk pilar tata pemerintahan yang baik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan membuktikan diri dengan capaian kinerja sebesar 99,78 % dengan data sebagai berikut:

NO	PROGRAM	DIPA TAHUN 2023	DIPA TAHUN 2022
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 5.861.837.000	Rp.5.984.915.000

Tabel 1. Program dan Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2022-2024 untuk tahun 2023 pada program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.861.837.000,- (*lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Secara garis besar, alokasi dan realisasi anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun anggaran 2022, dimana pada Desember 2022 anggaran telah terealisasi 99,78% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 99,59%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2025. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut yaitu :

1. Belum Optimalnya Penegakan Hukum;
2. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
5. Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya;
6. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta;
7. Penguatan Akses terhadap Keadilan;
8. Penataan Regulasi;
9. Penguatan Sistem Anti Korupsi; dan
10. Perbaikan Sistem Peradilan.

Berdasarkan 10 sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan dan

Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

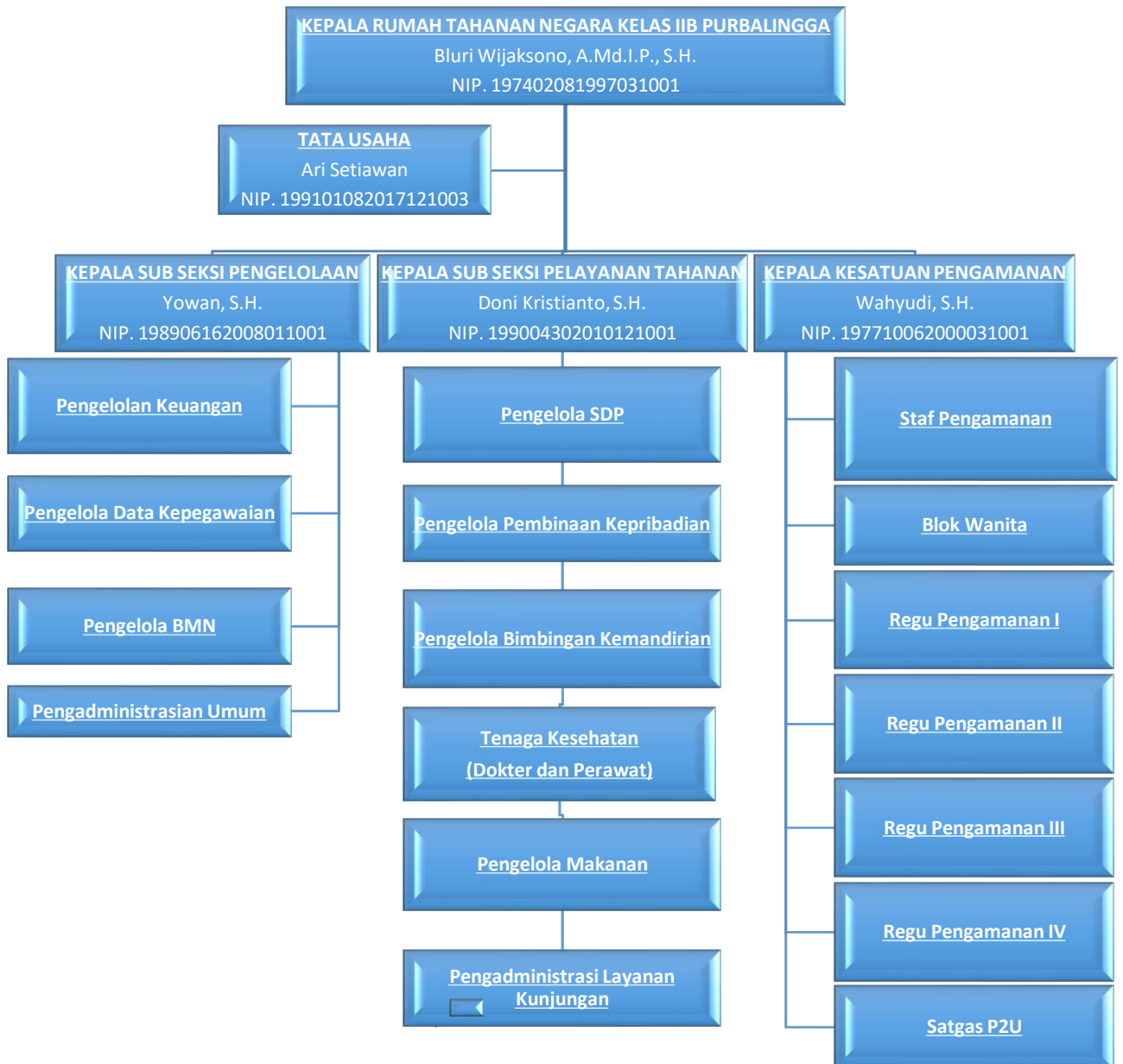
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;
4. Melakukan pelayanan tahanan;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan; dan
6. Melakukan pengelolaan Rutan.

Struktur organisasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara
2. Kepala Kesatuan Pengamanan
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
4. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
5. Petugas Tata Usaha

STUKTUR ORGANISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA



Gambar 1.1. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki tujuan dalam memenuhi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

D. Aspek Strategis

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam sistem reformasi birokrasi yang ada di Indonesia tentulah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sebagai salah satu instansi pelayanan publik menjadi organisasi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat adanya oknum - oknum yang memang membutuhkan pembinaan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Tentu erat kaitannya antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dengan Lembaga-lembaga hukum lain, dimana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga memiliki tugas pokok fungsi yang dapat melengkapi instansi lain yang terkait khususnya dalam sistem peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;
4. Melakukan melakukan pelayanan tahanan;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan; dan Melakukan pengelolaan Rutan.

E. Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki isu strategis berupa :

1. Kekurangan SDM serta peningkatan kebutuhan kompetensi SDM;
2. Usulan kenaikan *grade* tunjangan kinerja JFU karena pensiun belum terealisasi;
3. Kekurangan kendaraan dinas operasional pemindahan Tahanan;
4. Sebagian besar pintu, jendela, dan plafon kamar blok hunian sudah rapuh;
5. Alat pengolah air siap minum sudah rusak;
6. Alat *steamer* nasi hanya tersisa 1 unit;
7. Beberapa senjata api rusak;
8. Beberapa peralatan keamanan (bubuk merica, masker gas air mata) habis masa berlakunya;
9. Kekurangan tempat untuk pemeriksaan penyidikan dari APH;
10. Kebutuhan kenaikan daya listrik; dan
11. Kekurangan sarana dan prasarana ruang bermain anak.

Berdasarkan isu strategis tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga berupaya untuk memecahkan isu strategis tersebut dengan memunculkan inovas-inovasi yang relevan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga:

NO.	NAMA INOVASI	LATAR BELAKANG	DESKRIPSI	MANFAAT
1.	Sistem Pelayanan Rutan Purbalingga (TEMAN RANGGA)	Dilatarbelakangi oleh penyebaran pandemi Covid-19, memberikan dampak yang besar pada pemberian layanan baik kepada WBP maupun masyarakat terkait layanan kunjungan, paketan makanan dan/atau barang, pengurusan integrasi, layanan pengaduan, dan layanan informasi.	TEMAN RANGGA merupakan bentuk digitalisasi dari hampir sebagian besar bentuk pelayanan Rutan Kelas IIB Purbalingga kepada masyarakat. Sistem berbasis teknologi ini memudahkan masyarakat dalam menerima segala bentuk layanan Rutan Kelas IIB Purbalingga hanya dengan mengunjungi alamat https://linktr.ee/rutanpbg dimana link ini langsung menautkan pengguna layanan (masyarakat) pada layanan pengurusan integrasi (PB, CB dan CMB), informasi data tahanan dan narapidana, pengaduan online, alur layanan pemasyarakatan, rangka <i>e-mart</i> , papan informasi digital, serta survey IPAK-IKM.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan dalam kondisi pandemi Covid-19. • Memudahkan pengguna layanan tanpa harus mendatangi instansi tempat pemberi layanan. • Dapat diakses kapan pun dan dimana pun karena berbasis <i>website</i>
2.	ICIP-ICIP	Upaya meningkatkan kualitas pengolahan dan penyajian makanan bagi WBP juga monitoring penyimpanan bahan makanan serta kebersihan dapur.	ICIP-ICIP merupakan kegiatan pegawai Pemasyarakatan wanita Rutan Kelas IIB Purbalingga melakukan kontrol dapur Rutan Kelas IIB Purbalingga dengan memastikan penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyajian makanan juga kebersihan dapur sehingga kualitas makanan juga minuman bagi WBP terjamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rasa dan tekstur makanan bagi WBP. • Terjaminnya ketersediaan bahan makanan sesuai dengan permintaan. • Terjaminnya kesesuaian menu harian makanan bagi WBP.
3.	Sistem Antrian Pelayanan Rutan Purbalingga (SI ALAY RANGGA)	Dilatarbelakangi perkembangan era digitalisasi yang begitu cepat dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan akan kepuasan masyarakat. Mengantri	SI ALAY RANGGA adalah sistem informasi berbasis elektronik yang memiliki fungsi memudahkan masyarakat dalam memilih pelayanan yang akan diinginkan hanya dalam sekali sentuh saja. Kini, masyarakat tidak perlu berbaris untuk mengantri. Cukup dengan menekan layar sentuh untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pelayanan utamanya rasa nyaman yang dihadirkan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga kepada pengunjung.

		merupakan salah satu proses awal yang dialami masyarakat ketika menggunakan layanan publik, sehingga hal-hal terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan masyarakat.	mendapatkan nomor antrian layanan dan pengunjung dapat menunggu pemanggilan antrian layanan dengan nyaman. Perangkat ini dilengkapi dengan pemindaian wajah untuk memastikan keakuratan data pengunjung.	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya ketertiban dalam pelaksanaan proses layanan di Rutan Kelas IIB Purbalingga.
4.	Papan Informasi Digital Rutan Purbalingga (PADI RANGGA)	Perkembangan zaman sekarang memungkinkan masyarakat tidak asing dengan Handphone maupun komputer. Memungkinkan penyebaran informasi secara masif dapat dilakukan sebagai bentuk publikasi kegiatan dan transparansi oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga.	PADI RANGGA merupakan media digital menampilkan informasi secara cepat, masif dan tepat sasaran kepada masyarakat mengenai kondisi dan layanan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga serta galeri kegiatan WBP hanya dalam genggam dengan mengakses laman http://rutanpurbalingga.com	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi layanan secara cepat dan aktual kepada masyarakat luas terkait kondisi dan layanan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga baik untuk WBP maupun masyarakat.
5.	Survey Kepuasan Masyarakat Rutan Purbalingga (SUKA MAS RANGGA)	Penilaian kepuasan pelanggan merupakan output utama evaluasi pelayanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga.	SUKA MAS RANGGA merupakan sistem informasi berbasis <i>online</i> untuk menghimpun data elektronik dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap produk layanan yang memuat 5 kategori yaitu Sangat Puas, Puas, Cukup Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas.	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh informasi yang akurat tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan. • Bahan untuk evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan. • Petugas sebagai pelaksana pelayanan selalu merasa diawasi dan dinilai oleh masyarakat pengguna pelayanan.

6.	Sistem <i>Barcode</i> Kontrol Keliling Rutan Purbalingga (SI MBA KOLING RANGGA)	Tuntutan perkembangan zaman dan kemudahan akses data dibidang pengaman melatarbelakangi Kesatuan Pengaman Rutan Purbalingga menciptakan inovasi SI MBA KOLING RANGGA.	SI MBA KOLING RANGGA adalah sebuah website yang berfungsi untuk memastikan semua titik yang sudah ditetapkan telah dilakukan kontrol oleh regu pengaman dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan berfungsi untuk pengawasan atasan langsung terhadap kinerja pegawai dalam kontrol keliling blok hunian dengan alamat website http://tetapdalamkendali.com	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pola pikir dan budaya kerja petugas pengaman. • Merubah stigma dan perspektif “<i>melek teknologi</i>” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pengaman sebagai bentuk peningkatan kualitas kinerja.
7.	Ekspedisi Surat Pernyataan (E-SUPER)	Keterlibatan keluarga dalam pengusulan integrasi bagi WBP menjadi perhatian khusus Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam kaitannya memberikan layanan prima.	E – SUPER merupakan buku yang memiliki fungsi mencatat proses pemberkasan persyaratan usulan integrasi bagi WBP mulai dari penyerahan syarat administrasi dari penjamin keluarga WBP, pengambilan surat pernyataan jaminan keluarga dan penyerahan surat pernyataan jaminan keluarga. Dengan E – SUPER ini harapannya ada kemudahan dalam memonitoring surat pernyataan jaminan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan tugas dan fungsi kinerja pegawai. • Kemudahan dalam monitoring keluar masuk surat yang berkaitan dengan proses layanan integrasi.
8.	Buku <i>Checklist</i> Integrasi (BU CELINE)	Layanan integrasi merupakan hak yang didapatkan oleh WBP. Selaku pemberi layanan, Rutan Kelas IIB Purbalingga memastikan kesesuaian proses usulan integrasi sesuai dengan tahapan sehingga perlu adanya monitoring secara berkelanjutan.	BU CELINE merupakan buku yang memiliki fungsi memastikan monitoring dilakukan proses usulan integrasi WBP sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimulai dari pemberkasan, pengusulan litmas, usulan SDP hingga SK integrasi bagi WBP terbit.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam monitoring dan evaluasi alur/proses usulan layanan integrasi bagi WBP.
9.	Kunjungan Virtual Rutan Purbalingga (KUNIR RANGGA)	Pandemi covid 19 menjadi kendala WBP bertemu dengan anggota keluarga menjadi alasan Rutan Purbalingga	KUNIR RANGGA merupakan sebuah sarana untuk memfasilitasi WBP melakukan kunjungan virtual	<ul style="list-style-type: none"> • Terlindunginya pegawai, WBP serta keluarga maupun pihak lain dari paparan Covid-19.

		menciptakan inovasi KUNIR RANGGA.	dengan anggota keluarga berbasis IT menggunakan aplikasi Whatsapp <i>Video Call</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan fungsi kinerja pegawai dapat dilaksanakan dengan optimal.
10.	<i>Elektronic Money</i> (E-MON)	Dalam rangka mensukseskan program Bebas Peredaran Uang, (BPU) di Rutan Purbalingga, maka digulirkan program transaksi elektronik non tunai bagi warga binaan di kantin koperasi dan wartelsuspas.	<p>Layanan E-MON merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan sarana mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) untuk bertransaksi secara <i>relatime online</i>.</p> <p>Layanan ini bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Purbalingga dalam pengadaan layanan. Setiap WBP diberikan kartu Brizzi yang sudah berisi nomor rekening <i>virtual account</i> (VA) dan disampaikan ke pihak keluarga dengan maksimal <i>top up</i> sebesar satu juta rupiah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada resiko penyalahgunaan uang. • Uang tersimpan dalam saldo VA lebih aman daripada membawa uang tunai ke dalam kamar hunian. • Pihak keluarga tidak perlu datang ke Rutan Kelas IIB Purbalingga jika ingin mengirim uang hanya perlu transfer ke VA. • Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas layanan di Rutan Kelas IIB Purbalingga.
11.	<i>Self Service</i> WBP	Sebelum adanya inovasi <i>Self Service</i> WBP, pemberian informasi terkait hak WBP dilayani oleh Petugas Registrasi dengan datang langsung ke ruang registrasi sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh WBP menjadi keharusan guna peningkatan kualitas pelayanan.	<i>Self Service</i> WBP adalah sistem informasi berbasis <i>online</i> yang menyajikan data elektronik tentang proses admisi WBP mulai dari masa penahanan, putusan, eksekusi, masa pidana, ekspirasi, program pembinaan, remisi, CB, PB, asimilasi dan informasi penting lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • WBP dapat mengakses informasi tentang proses pemidanaan masa penahanan, putusan, eksekusi, masa pidana, ekspirasi, program pembinaan, remisi, CB, PB, asimilasi dan informasi penting lainnya dengan mudah, cepat dan akurat. • Ada kepastian informasi proses pemidanaan bagi WBP.

12.	SDP <i>Biometric</i> Portir	Lalu lintas menjadi perhatian penting di Rutan Kelas IIB Purbalingga utamanya pada portir. Pencatatan lalu lintas WBP yang keluar area Rutan seperti Bon Pinjam, Sidang, Asimilasi luar dan lain-lain menjadi perhatian sangat penting, sehingga diperlukan pencatatan identitas diri dan kepentingan yang sangat baik guna memastikan kesesuaian data identitas WBP yang akan keluar/masuk melintasi Portir.	SDP <i>Biometric</i> Portir merupakan sarana pencatatan lalu lintas keluar/masuk WBP melintasi portir berbasis IT. Setiap WBP yang keluar/masuk harus melakukan <i>scan</i> sidik jari, sehingga dapat dipastikan kesesuaian identitas WBP tersebut serta dilengkapi dengan daftar riwayat keluar/masuk WBP.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipastikan pertanggungjawaban atas WBP yang keluar/masuk melintasi Portir sesuai dengan penginputan keperluan dan identitas diri. • Terdapat riwayat keluar/masuk WBP, sehingga data tercatat dengan baik. • Menghindari kekeliruan identitas WBP yang keluar/masuk Portir guna mengurangi potensi adanya gangguan keamanan dan ketertiban.
13.	Pengaduan <i>Online</i> Rutan Purbalingga (PEDULI RANGGA)	Kemudahan akses informasi dan pengaduan permasalahan merupakan hal yang penting dalam peningkatan layanan Rutan Kelas IIB Purbalingga. Sehingga, diperlukan solusi yang memudahkan masyarakat atau keluarga WBP mengirim pengaduan. Sebelum adanya Pengaduan <i>Online</i> , masyarakat atau keluarga WBP perlu datang langsung ke Rutan Kelas IIB Purbalingga.	<p>PEDULI RANGGA merupakan layanan yang disediakan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga guna memudahkan masyarakat untuk memberikan pengaduan tanpa harus datang langsung ke Rutan Kelas IIB Purbalingga.</p> <p>Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui nomor <i>WhatsApp</i> khusus pengaduan yang disediakan Rutan Kelas IIB Purbalingga atau melalui akun media sosial Rutan Kelas IIB Purbalingga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan masyarakat atau keluarga WBP menyampaikan aduan. • Dapat diakses secara cepat. • Pengaduan dapat langsung ditanggapi oleh petugas aduan dan diteruskan ke pihak – pihak terkait.
14.	Permohonan Informasi Rutan Purbalingga	Keluarga WBP atau pihak lain yang membutuhkan informasi perlu untuk datang langsung ke	PERMISI RANGGA merupakan layanan berbasis digital bagi masyarakat, keluarga WBP dan pihak lain yang akan mengajukan permohonan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan masyarakat, keluarga WBP atau pihak lainnya mendapatkan

	(PERMISI RANGGA)	Rutan Kelas IIB Purbalingga. Namun, karena pandemi Covid-19, kontak secara langsung dengan pihak luar dibatasi sehingga Rutan Kelas IIB Purbalingga menyediakan PERMISI RANGGA yang diakses secara mudah melalui <i>website</i> oleh masyarakat atau pihak lainnya,	secara <i>online</i> melalui website Rutan Kelas IIB Purbalingga (http://rutanpurbalingga.kemenkumham.go.id/).	informasi terkait Rutan Kelas IIB Purbalingga. <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diakses kapan pun dan dimana pun karena berbasis <i>website</i>.
--	------------------	---	---	---

Tabel 1.1. Inovasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Kata Pengantar, menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023.

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Tahun 2023.

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKJIP, tugas, fungsi dan struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, serta sistematika laporan;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Anggaran Tahun 2023;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Tahun Anggaran Tahun 2023 mencakup:

- a. Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;
- b. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. Capaian Kinerja Anggaran, menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variable yaitu kinerja Aplikasi SMART DJA dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan
- d. Capaian Kinerja lainnya, diuraikan capaian kinerja melalui aplikasi Eperformance, Target Kinerja, dan e-Monev Bappenas.

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran Tahun 2023 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang RPJM Nasional 2022-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2022- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2022-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2022-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain PASTI, core value yang harus dijunjung yaitu **BerAKHLAK** (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**). Kelahiran "BerAKHLAK" dilatarbelakangi penerjemahan berbeda-beda atas nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.



B. Perjanjian Kinerja

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022-2024, antara lain:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Adapun program dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 6.399.253.000	Rp. 5.861.837.000

Tabel 2.1. Program dan Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2022-2024 untuk tahun 2023 pada program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu

DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.399.253.000,- (*enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) dan mengalami revisi anggaran terkait kelebihan belanja Pegawai dan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi sebesar Rp.5.861.837.000,- (*lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menulardan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
		4. Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	80%
		5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		8. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		9. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		10. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 2.4. Sasaran Kegiatan Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam tahun 2023 ini diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah. dimana Persentase pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa "semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian semakin baik". Sesuai dengan target, yang telah ditetapkan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat lihat pada tabel dibawah ini:

1. Realisasi kinerja tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	100%
	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah.	80%	100%
	Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib.	85%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit	2 Unit
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit	1 Unit
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit

Tabel 3.4. Realisasi Kegiatan Program Tahun 2023

1. MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN

a) Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying*

Tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya disebut sebagai *Overstaying*.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, tidak terdapat WBP yang mengalami *overstaying*, hal ini di buktikan dengan data pada Aplikasi SDP sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2023
1	Overstaying	0	0
Total		0	0

Tabel 3.5. Data *Overstaying* pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Tidak terdapat WBP yang *overstaying* pada Rutan Purbalingga. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target 70%

Realisasi 0 orang dari 0 WBP ($0/0 \times 70\% = 0\%$)

Capaian $0/70 \times 100\% = 0\%$

Catatan Seluruh Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak ada yang mengalami *overstaying* karena kami selalu berkoordinasi dengan Pihak Penahan untuk Perpanjangan masa Tahanan.

b) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Kegiatan Penyuluhan Hukum pada Rutan Kelas IIB Purbalingga menjadi salah satu agenda Rutin pada Rutan Purbalingga setiap bulannya. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini bekerja sama dengan Bagian Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga. Untuk Optimalisasi kegiatan yang dilakukan berupa:

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Biaya sebesar Rp 3.140.000,- dengan realisasi per Desember 2023 sebesar Rp 3.140.000,- (100%) digunakan untuk menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan berupa Belanja Bahan seperti pembelian Snack dan Pencetak Banner untuk Penyuluhan.

No	Uraian	2023
1	Penyuluhan Hukum	165
Total		165

Tabel 3.6. Data WBP yang ikut serta dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 Semester I adalah sebagai berikut:

Target 70%

Realisasi 165 orang dari 165 WBP ($165/165 \times 70\% = 70\%$)

Capaian $70/70 \times 100\% = 100\%$

Catatan Seluruh Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga mendapat Layanan Penyuluhan Hukum.

c) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Selain menerima Layanan Penyuluhan Hukum, Rutan Kelas IIB Purbalingga juga memastikan Tahanan menerima Fasilitas Bantuan Hukum. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Target 70%

Realisasi 165 orang dari 165 WBP ($165/165 \times 70\% = 70\%$)

Capaian $70/70 \times 100\% = 100\%$

Catatan: Seluruh Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga mendapat Layanan Fasilitas Bantuan Hukum.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan tahanan sesuai standar, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah melakukan pelayanan tahanan terhadap 141 orang Narapidana/Tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Purbalingga.

Kegiatan pelayanan tahanan yang dilakukan oleh Subsidi Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Untuk optimalisasi kegiatan layanan tahanan tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Administrasi Tahanan dengan biaya Rp 23.610.000,- dan realisasi sebesar Rp 23.610.000,- digunakan untuk melakukan kegiatan berupa Sidang TPP dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.000.000,- yang digunakan untuk pembuatan laporan kegiatan. Kegiatan pemberian remisi, PB, CB, CMB, CMK dengan biaya Rp 11.350.000,- dan realisasi Rp 11.350.000,- digunakan untuk penggantian dan penjilidan serta pemberian remisi pada hari

kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar keagamaan. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan biaya sebesar Rp 3.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.140.000,- (100%) digunakan untuk menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan berupa belanja bahan seperti pembelian snack dan pencetak banner untuk Penyuluhan. Kegiatan rapat koordinasi dengan biaya sebesar Rp 8.120.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.120.000,- yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas kegiatan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Kegiatan Pembimbingan Kegiatan Tahanan dengan biaya Rp 75.860.000,- dan realisasi sebesar Rp 75.798.000,- digunakan untuk mengakomodir 2 kegiatan pembimbingan tahanan berupa Kegiatan Keagamaan serta Kegiatan Kesenian dan Olahraga. Dibidang Agama, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melakukan pembinaan kepada Narapidana/Tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Purbalingga mulai dari Agama Islam, Katolik dan Kristen yang rutin dilakukan. Di bidang Kesenian dan Olahraga, Rutan Purbalingga juga telah rutin melakukan senam yang dilakukan setiap hari.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Tabel

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2022

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023
Narapidana/Tahanan Dewasa	178	165
Narapidana/Tahanan Anak	-	-
Jumlah	178	165
Selisih Penambahan Penghuni		
Kapasitas	98	98

Selisih penambahan kapasitas		
<i>Overcrowded</i>	81,63 %	68%

Analisa Tabel : Tabel diatas menggambarkan fluktuatifisi Narapidana/Tahanan yang ada pada Rutan Kelas IIB Purbalingga yang selalu melebihi kapasitas (*overcrowded*).

Tabel

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2022
1. Keagamaan		
	a. Islam	162
	b. Kristen Katolik	3
	c. Kristen Protestan	0
	d. Hindu	0
	e. Budha	0
	f. Konghucu	0
2. Olahraga		
	a. Senam	165
	b. Tenis meja	32
	c. Bulu tangkis	35
	d. futsal	28
	e. Volley	20
3. Kesenian		
	a. Musik Band	165
	b. Hadroh	32

Analisa Tabel:

- a) Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian (kegiatan keagamaan) dan kegiatan Kesenian dan olah raga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kepribadian sekitar 100%. Kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Yayasan-yayasan keagamaan terus ditingkatkan demi

meningkatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Kegiatan pembinaan Kepribadian dan Kesenian/olahraga dikelola oleh 2 orang petugas JFU.

- b) Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian (keagamaan) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga berupa tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen, dan perlu dibuat kegiatan yang lebih variatif untuk menarik minat WBP untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pembinaan kegiatan olah raga sudah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan data masyarakat di SDP sesuai standar, UPT Masyarakat dalam hal ini Lembaga Masyarakat yang dikelola oleh Subsidi Pelayanan Tahanan pada tiap UPT (Rutan) sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Layanan Informasi dan Komunikasi Masyarakat yang ada di Rutan Kelas IIB Purbalingga telah berjalan dengan baik, meskipun sarana dan prasarana kurang mendukung. Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Masyarakat perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Tabel

Data Pelaksanaan Sistem Database Masyarakat

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	1. Ruang Server	1	Baik
	2. Rack Server	-	
	3. Pemadam Kebakaran (APAR)	3	Baik
	4. Pendingin Ruangan/AC	1	Baik
	5. CCTV	2	Baik
	6. Sidik Jari (registrasi)	4	Baik
2	Perangkat Keras		
	7. Server	1	Baik
	8. Komputer	20	Baik

9. Hub/Switch	5	Baik
10. Router Wifi	1	Baik
11. Printer	7	Baik
12. Scanner	6	Baik
13. Scanner Sidik Jari	13	Baik
14. Kamera	20	Baik

Analisa Tabel:

Berdasarkan tabel diatas, pada Rutan Purbalingga menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dari registrasi hingga pengeluaran.

Kegiatan pengelolaan SDP dilakukan dengan menggunakan ruangan Registrasi dan belum memiliki ruangan khusus. Selain itu, sarana dan prasarana untuk kegiatan pengelolaan SDP belum lengkap.

Untuk Layanan Kunjungan, di Rutan Kelas IIB Purbalingga masih dilakukan dengan basis IT dan manual dengan menggunakan blanko besukan dan belum memiliki ruangan khusus dan masih menggunakan ruang registrasi untuk pendaftaran besukan.

Tabel

Jumlah pemohon layanan informasi tahun 2023

No	Pemohon Layanan	Jumlah
		Layanan Informasi
1	Narapidana	110
2	Keluarga	196
3	Masyarakat	-

Analisa Tabel:

Pada tahun Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah memberikan layanan informasi kepada narapidana dan keluarga. Layanan yang diberikan kepada narapidana berjumlah 100 layanan dan kepada keluarga berjumlah 196 layanan. Layanan informasi diberikan di ruang pendidikan oleh petugas bimbingan berupa informasi pembebasan

bersyarat, remisi, cuti menjelang bebas, dan peraturan yang perlu ditaati didalam Rutan. Layanan yang diberikan sudah menggunakan fasilitas yang memadai untuk mengaplikasikan layanan informasi yang berbasis IT.

Tabel 10.

Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2023

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	21	21
2	CMB	0	0
3	CB	9	9
4	Asimilasi Rumah	54	54
5	CMK	0	0
JUMLAH		75	75

Analisa Tabel:

- a) Program usulan Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah merupakan hak WBP yang diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, dan setiap WBP yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 pasti diusulkan program reintegrasi dengan tujuan :
 - Mempercepat proses bebas WBP.
 - Mendekatkan WBP dengan keluarga dan Lingkungan.
 - Memberikan kesadaran agar WBP tidak mengulangi tindak pidana kembali.
- b) Rata-rata perbulan WBP yang diusulkan program integrasi sebanyak 8 orang per bulan, dan petugas Pembinaan yang bertugas menyelenggarakan proses integrasi sebanyak 1 orang.
- c) Hambatan yang dihadapi :
 - Banyak WBP yang tidak bisa diusulkan program PB/CMB/CB /Asimilasi/CMK karena terhambat PP 99 tahun 2012
 - Tidak mendapatkan penjamin dari pihak keluarga sesuai ketentuan, dan
 - Sulitnya mencari yayasan untuk pelaksanaan program asimilasi

WBP.Tabel

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Pembebasan Bersyarat	12	21
2	Cuti Menjelang Bebas	0	0
3	Cuti Bersyarat	6	9
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0
5	Asimilasi	40	54
Jumlah		58	75

Analisa Tabel:

- a) Dari tabel diatas program Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) dibandingkan Tahun 2022 sampai tahun 2023 terjadi penurunan, hal ini terjadi karena pelaksanaan program reintegrasi tergantung tanggal 2/3 para WBP yang mengikuti program tersebut.
- b) Kenaikan tersebut juga disebabkan karena dengan diberlakukannya Usulan PB,CB,CMB secara online sehingga mempercepat proses sampai pada terbitnya SK, serta meningkatnya kesadaran WBP untuk mengikuti Program Pembinaan dan terpenuhinya syarat-syarat ditentukan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, walaupun banyak WBP yang termasuk dalam kasus yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012.

2. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA / TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA

a) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar

Implementasi pemenuhan hak WBP untuk mendapatkan makanan yang layak diwujudkan melalui pemberian makanan segar dan bergizi setiap hari bagi seluruh WBP. Pendistribusian bahan-bahan makanan sebagai bahan utama menu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Purbalingga dilakukan setiap pagi. Hal ini dilakukan demi menjaga kesegaran bahan makanan WBP. Kualitas dari bahan makanan juga menjadi kunci kesehatan

warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Purbalingga. Rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilakukan ini merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemenuhan layanan makanan yang baik, terstandar, menyeluruh dan berkesinambungan berupa penyediaan bahan makanan bagi Narapidana/Tahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.397.585.000 yang digunakan untuk penyediaan bahan makanan berupa beras dan lauk pauk untuk 191 Narapidana/Tahanan selama 365 hari dengan harga satuan Rp 19.000,- yang dihitung sesuai dengan SBM yang berlaku dan sudah terealisasi sebesar Rp 1.389.337.000,-

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 Semester I adalah sebagai berikut:

Target	=	71%
Realisasi	=	212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 71\% = 71\%$)
Capaian	=	$71/71 \times 100\% = 100\%$
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah Mendapatkan Layanan Makanan

b) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan/Narapidana/Anak sehingga dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan baik

secara nasional maupun internasional. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target	=	92%
Realisasi	=	212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 92\% = 92\%$)
Capaian	=	$92/92 \times 100\% = 100\%$
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah Mendapatkan Layanan Kesehatan secara berkualitas.

c) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Narapidana serta anak sehingga dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target	=	95%
Realisasi	=	0 orang dari 165 WBP ($0/0 \times 95\% = 0\%$)
Capaian	=	$95/95 \times 100\% = 100\%$
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah Mendapatkan Layanan Kesehatan maternal.

d) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Layanan Kesehatan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang dapat tertangani guna meningkatkan kualitas hidup Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita gangguan mental. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target	=	60%
Realisasi	=	0 orang dari 212 WBP ($0/0 \times 60\% = 0\%$)

Capaian = $60/60 \times 100\% = 100\%$

Catatan = Seluruh Tahanan/Narapidana/Anak pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah Mendapatkan Penanganan gangguan mental.

e) Persentase Narapidana/ Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Narapidana sehingga dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Selain Pelayanan Perawatan dan Kesehatan juga terdapat kegiatan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi yaitu Penyediaan Bahan Makanan kepada Warga Binaan baik Narapidana / Tahanan. Rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilakukan ini merupakan upaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Perawatan Kesehatan yang baik, terstandar, menyeluruh dan berkesinambungan antara lain :

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 159.461.000,- dan realisasi sebesar Rp. 158.384.000,- di dalam kegiatan ini terdapat komponen pendukung seperti: pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan sarana makan dan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan medis poliklinik, extra fooding, dan pemulasaran. Dimana seluruh komponen tersebut telah berjalan dengan baik sehingga pelayanan perawatan kesehatan terhadap 212 Narapidana/Tahanan pada Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat berjalan sesuai standar.
- Layanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.293.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.285.900,- di dalam kegiatan ini terdapat komponen pendukung seperti: perawatan kesehatan tahanan/narapidana dan perlengkapan medis poliklinik, yang digunakan untuk pembelian obat-obatan serta perlengkapan poliklinik.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2023 Semester I adalah sebagai berikut:

Target = 75%

Realisasi = 212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 75\% = 75\%$)

Capaian = $75/75 \times 100\% = 100\%$
 Catatan = Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Dalam melakukan Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai Standar telah dilakukan dengan baik oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang perawat di Rutan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan Narapidana/Tahanan di Rutan Kelas IIB Purbalingga juga bekerjasama dengan perawat dan dokter dari Puskesmas I Purbalingga. Ketersediaan obat-obatan juga telah dipenuhi. Namun, masih terdapat kurangnya peralatan medis/poliklinik yang ada pada Rutan yang diakibatkan karena tidak adanya dana untuk belanja modal peralatan medis/poliklinik pada TA Tahun 2023.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Tabel

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2022		2023	
		ParuhWaktu	PurnaWaktu	ParuhWaktu	PurnaWaktu
1	Dokter Umum	-	-	-	1
2	Dokter Gigi	-	-	-	-
3	Perawat	-	-	-	1
4	Psikolog/Psikiater	-	-	-	-
5	Ahli Gizi	-	-	-	-
Total		-	-	-	2

Analisa Tabel :

Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun Tahun 2023 tenaga kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yaitu dokter umum 1

orang dan perawat 1 orang. Dengan tersedianya tenaga medis dapat melayani kesehatan warga binaan dengan baik.

Tabel

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1	Hepatitis	0	0
2	IMS	0	0
3	TBC	0	15
4	HIV	0	0
5	Jantung	0	1
6	Kanker		
7	Pencernaan	100	121
8	Lain-lain	0	0
Jumlah		100	136

Analisa Tabel :

- a) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Pada tahun 2022 WBP yang menderita penyakit berjumlah 100 orang.
- b) Kebanyakan penyakit yang diderita oleh WBP tersebut dibawa dari luar Rutan atau dengan kata lain penyakit yang diderita WBP tersebut tidak ditularkan dari pergaulan WBP di dalam Rutan.

c) Dalam rangka perawatan kesehatan WBP ini, Rutan Kelas IIB Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 53.632.000,- untuk pembelian obat-obatan guna mencekah berkembangnya penyakit didalam Rutan yang pada Tahun Tahun 2023 telah terealisasi per Desember 2023 sebesar Rp 53.631.400,- yang digunakan untuk pembelian obat-obatan dan alat medis bagi WBP serta perawatan WBP di luar Rutan.

f) Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yangmendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Perawatan Kesehatan bagi WBP berkebutuhan khusus di Rutan Purbalingga telah dilaksanakan oleh bagian Poliklinik Rutan, Rutan Purbalingga juga telah membuat fasilitas khusus untuk pelayanan Kesehatan yang berkebutuhan Khusus (Disabilitas). Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target = 75%

Realisasi = 212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 75\% = 75\%$)

Capaian = $75/75 \times 100\% = 100\%$

Catatan = Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus (Disabilitas), pada Rutan Kelas IIB Purbalingga

g) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlahvirusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Tabel

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2022		2023	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-

Pencernaan	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-
Perkelahian/Pe mbunuhan	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-

Analisa Tabel :

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yang disebabkan oleh penyakit diatas adalah sebagai berikut :

Pada tahun Tahun 2023, tidak terdapat warga binaan yang meninggal sehingga pemulasaraan tidak terealisasi..

Tabel

Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	-	-
3	Jalan Luar	-	-

Analisa Tabel: Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada WBP yang menjalani rawat inap.

Tabel

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah	
		2022	2023
1	HIV/Aids	-	-
2	TBC	-	15
3	Hepatitis	-	-
4	Penyakit Kulit	-	-
5	Penyakit Mata	-	-
Total		-	15

Analisa Tabel: Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun Tahun 2023 terdapat WBP yang menderita penyakit menular.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Tahun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target = 60%

Realisasi = 15 orang dari 212 WBP ($15/15 \times 60\% = 60\%$)

Capaian = $60/60 \times 100\% = 0\%$

Catatan = Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga

telah mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Rutan Kelas IIB Purbalingga

h) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Perubahan hidup kualitas hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika diperlukan guna meningkatkan derajat hidup Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Tahun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target = 23%
Realisasi = 212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 23\% = 23\%$)
Capaian = $23/23 \times 100\% = 100\%$
Catatan = Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah mendapatkan pelayanan perubahan kualitas hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

3. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

a) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Menjawab ketentuan yang ada di UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat. Pelayanan bagi WBP selama menjalankan pidana berupa pelayanan registrasi/administrasi, pelayanan pembinaan, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perawatan. Sedangkan bagi masyarakat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga memberikan pelayanan berupa pelayanan kunjungan, pelayanan informasi, dan pelayanan pengaduan.

Agar dapat memberikan pelayanan prima atau pelayanan yang semakin baik, petugas pelayanan informasi dan dokumentasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan cara meminta pendapat pengunjung dengan cara mengisi angket yang di dalamnya terdapat Sembilan unsur yang harus dinilai responden, berupa kemudahan mendapatkan pelayanan, kesesuaian pelayanan, ketepatan pelayanan, biaya pelayanan, prosedur pelayanan, kemampuan petugas memberikan pelayanan, sikap petugas, pemasangan maklumat, pengadaan sarana pengaduan. Selain Sembilan unsur tersebut, pada survey juga ditampilkan indeks kepuasan masyarakat secara umum terhadap pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Survei pelayanan publik berupa layanan kunjungan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mempunyai tujuan :

1. Mengetahui informasi atau gambaran sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat menerima pelayanan publik berupa pelayanan kunjungan pada tahun Tahun 2023.
2. Mengetahui keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melalui saran-saran yang diberikan

Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemsayarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah 19.83 / Sangat Baik (A) dengan responden sebanyak 31 Orang.

Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kondisi Awal

1. Sistem Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran kunjungan menggunakan SDP secara optimal (pengambilan identitas, foto, sidik jari), dan sistem pengambilan nomor antrean masih manual di berikan oleh petugas pelayanan.

2. Sistem Pengeledahan Barang

Pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan di ruang porter secara manual.

3. Sistem Pengeledahan Orang

Pengeledahan terhadap pengunjung dilaksanakan Portir menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang pengeledahan.

4. Sistem Pemanggilan

Pemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas, kemudian petugas blok meminta bantuan tamping blok untuk memanggil WBP yang akan dikunjungi.

5. Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan dilaksanakan di ruang kunjungan yang diawasi oleh

petugas. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi harus diantar kembali ke blok atau kamar hunian oleh petugas.

B. Pelaksanaan Evaluasi

1. Survey Pelayanan Kunjungan

Survey pelaksanaan kunjungan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

2. Rapat Evaluasi

Rapat evaluasi dilaksanakan oleh kalapas bersama para pejabat structural dengan menghasilkan rekomendasi dilakukan perubahan pelayanan kunjungan yang semula konvensional / manual menjadi berbasis Teknologi Informasi dengan perbaikan di beberapa lokasi layanan.

C. Pelaksanaan Perubahan Pelayanan Kunjungan

- Penambahan komputer pendaftaran kunjungan.
- Pemasangan komputer di portir.
- Pemasangan banner informasi.
- Pemasangan banner hak dan kewajiban WBP.
- Pemasangan banner anti pungli dan nomor pengaduan.

D. Hasil Tindak Lanjut

1. Sistem Pendaftaran

Pengambilan nomor antrian dilakukan secara manual dengan menggunakan Nomor Antrean

2. Sistem Pengeledahan Barang

Pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan secara manual sehingga pelayanan tidak bisa cepat.

3. Sistem Pengeledahan Orang

Pengeledahan terhadap pengunjung dilaksanakan Portir lebih teratur dan tertib menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang pengeledahan.

4. Sistem Pemanggilan

Pemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas

5. Pelaksanaan Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan dilakukan di ruang kunjungan dengan bersentuhan Langsung antara WBP dengan pengunjung dengan batas waktu kunjungan selama 30 menit. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi langsung kembali ke blok atau kamar hunian.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga saat ini telah menggunakan fitur SDP (Layanan Kunjungan) secara optimal sesuai dengan hasil questioner yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan hasil baik. Optimalisasi peningkatan pelayanan pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi terus ditingkatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga untuk mencegah terjadinya Pungli. Adapun peningkatan pelayanan berbasis TI meliputi Program Bebas Peredaran Uang berbasis uang digital, Pelayanan Kunjungan Berbasis TI, Pelayanan Pengamanan berbasis TI, pembuatan layanan informasi WBP SMS Gateway.

b) Persentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah

Dalam Melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Kelas IIB Purbalingga

Tabel 19.

Data Kerjasama

No	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat/Tanggal penandatanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggungjawab
1	Nihil				

Rutan Kelas IIB Purbalingga melakukan kerjasama dengan Instansi terkait untuk dapat mengoptimalkan Kegiatan di Rutan Purbalingga. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga pada tahun Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

Target : 60%
Realisasi : 212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 60\% = 60\%$)
Capaian : $60/60 \times 100\% = 100\%$
Catatan : Seluruh Tahanan/ Narapidana pada Rutan Kelas IIB Purbalingga telah dilaksanakan pencegahan gangguan kamtib pada Rutan Kelas IIB Purbalingga

Pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu atau lebih dikenal dengan residivis.

Tabel 20

Data Residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

No	Uraian	2022	2023
1	Residivis	27	26
Total		27	26

Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi penurunan 1 orang residivis pada tahun 2023.

c) Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tata Tertib yang terdapat di Rutan Purbalingga sudah disosialisasikan secara menyeluruh kepada Seluruh WBP baik itu Tahanan yang baru masuk, dan yang sudah menjadi Narapidana. Sosialisasi ini dilakukan setiap Bulan serta telah ditempelkan di halaman blok Rutan. Di Tahun Tahun 2023 tidak terdapat data gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Purbalingga. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Kelas IIB Purbalingga pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Target : 75%

Realisasi : 212 orang dari 212 WBP ($212/212 \times 75\% = 75\%$)
Capaian : $75/75 \times 100\% = 100\%$

d) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Layanan Keamanan dan Ketertiban merupakan pelaksanaan tugas utama pengamana di lapas/rutan. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman di lapas/ Rutan. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawalan, pemindahan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Rutan diantaranya melakukan kegiatan razia dan penggeledahan yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawalan Narapidana yang bekerja diluar Rutan.

Tabel

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	
	2022	2023
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
Jumlah	-	-

Analisa Tabel:

- a) Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2022 – 2023, Tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban Tahun 2023. Walaupun tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban, pihak Rutan tetap melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan

pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya.

- b) Kegiatan Keamanan dan Ketertiban mendapat alokasi dana sebesar Rp 20.080.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 20.069.900,- yang digunakan untuk kegiatan pengawasan Napi/Tahanan, kegiatan Razia dan Penggeledahan dan kegiatan Sarana dan Prasarana Kamtib.

Tabel

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman	Tahun	
	2022	2023
Disiplin		
SK Hukuman Disiplin		
Hukuman Disiplin Ringan	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0
Hukuman Disiplin Berat	0	0
Total	0	0

Analisa Tabel : Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2022 – 2023 tidak terdapat petugas yang melakukan pelanggaran, hal ini membuktikan bahwa Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku petugas sudah berjalan lancar dan petugas mengerti akan kode etik Petugas Pemasyarakatan.

Dengan demikian capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Target : 60%

Capaian : $60/60 \times 60\% = 60\%$

Realisasi : $60/60 \times 100\% = 100\%$

4. MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

- a) **Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu**

Setiap UPT Pemasyarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu

memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasyarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan. Rutan Kelas IIB Purbalingga melakukan kegiatan berupa :

- Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dengan biaya sebesar Rp 8.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.759.000,- yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas guna mempercepat kegiatan penyusunan RKAKL di Lingkungan Rutan Purbalingga
- Manajemen Keuangan UPT sebesar Rp 9.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.755.000,- yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas untuk urusan keuangan pada Rutan Purbalingga.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 1 Layanan = 1 Layanan

Realisasi : 1/1 X 1Layanan = 1 Layanan

b) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah merupakan tugas serta Satker dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan BMN yang dikelola satker. Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Urusan umum dengan Biaya sebesar Rp 18.220.000,- realisasi sebesar Rp 18.162.700,- yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran pada Rutan Purbalingga.
- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dengan biaya sebesar Rp 7.268.000,- realisasi sebesar Rp 7.149.500,- digunakan untuk biaya

perjalanan dinas dalam rangan urusan inventarisasi BMN di Lingkungan Satker.

- Administrasi Pengadaan Barjas dengan biaya sebesar Rp 11.580.000,- realisasi sebesar Rp 11.580.000,- yang digunakan untuk membayarkan honorarium dalam rangka pengadaan barjas di Rutan Purbalingga.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 1 Layanan = 1 Layanan

Realisasi : 1/1 X 1Layanan = 1 Layanan

c) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan kepegawaian berupa kegiatan pembinaan Fisik dan Mental (FMD) adalah kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mental pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 21.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.200.000,-

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 1 Layanan = 1 Layanan

Realisasi : 1/1 X 1Layanan = 1 Layanan

d) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuanganyang akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan berupa

kegiatan belanja bahan dan perjalanan dinas untuk keperluan Pengelola Sistem SAI dengan biaya Rp. 9.760.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.755.000,-

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 1 Layanan = 1 Layanan

Realisasi : 1/1 X 1Layanan = 1 Layanan

e) Jumlah Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran dengan biaya Rp 3.988.948.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.974.897.914,- digunakan untuk kegiatan Belanja Pegawai dan operasional kantor. Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 1 Layanan = 1 Layanan

Realisasi : 1/1 X 1Layanan = 1 Layanan

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun Tahun 2023 Semester I dengan tahun sebelumnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kretifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Presentasi tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	100	100
Memastikan Pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Hukum	100	100
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks kemaanan dan ketertibanUPT Pemasarakatan	100	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Pelayanan Tahanan	100	100
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	100	100
	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	100	100
	3. Indeks Kepuasan Pengguna IT Pemasyarakatan	100	100
	4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, anak dan Tahanan	100	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	100	100
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	100%	100%
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%

Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	100%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	100%	100%
	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%
	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah.	100%	100%
	Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib.	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
Nilai Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
PA	98,75	98,02
Nilai SMART	99,87	99,87

3. Capaian kinerja tahun Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Kondisi saat ini terkait Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga masih akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian substansi di dalamnya, termasuk di dalamnya target jangka menengah dikaitkan dengan amanat yang tertuang dalam RPJMN dan standar nasional. Nantinya, Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga akan memuat target yang lebih rigid dan detail terutama target jangka menengah dan target jangka panjang. Namun, saat ini target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga hanya memuat target jangka menengah secara umum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra				Realisasi 2023
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%	100%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%	100%

		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPTP masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layan an	1 Layan an	1 Layana n	1 Layan an	100%
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1 Layan an	1 Layan an	1 Layana n	1 Layan an	100%
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layan an	1 Layan an	1 Layana n	1 Layan an	100%
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layan an	1 Layan an	1 Layana n	1 Layan an	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Semester I dengan Target Renstra 2022-2024

Capaian kinerja tahun Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra yaitu pada tahun sebelumnya di tahun 2022 mengalami peningkatan sesuai dengan target, dan dengan hasil nyata tersebut, tidak dimungkinkan pada tahun 2023 dan 2024 akan dapat memenuhi target.

Upaya yang dapat dilakukan guna menunjang realisasi tersebut adalah dengan peningkatan sarana dan fasilitas penunjang layanan, pemanfaatan teknologi, perbaikan sarana dan prasarana penunjang.

4. Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar.

Pada tahun Tahun 2023 seluruh Narapidana telah mendapatkan pembinaan kepribadian, keterampilan, pelayanan integrasi, pendayagunaan TPP dan pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan dari kebijakan pimpinan yang mengharuskan seluruh napi/tahanan harus mengikuti kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian berupa keagamaan, olah raga bersama, sholat berjamaah bagi Narapidana yang beragama Islam maupun kegiatan kemandirian berupa pertukangan, menjahit dan kegiatan pelatihan kemandirian lainnya.

b) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah memberikan layanan perawatan narapidana dan tahanan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi Narapidana dan Tahanan baru, perawatan kesehatan khusus bagi napi/tahanan yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Seluruh narapidana dan tahanan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan narapidana dan tahanan yang telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

- c) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga secara berkelanjutan melaksanakan sidak razia, penggeledahan dan melakukan pengawalan narapidana dan tahanan. Selain itu setiap pengunjung/penjenguk akan mendapatkan pemeriksaan dan penggeledahan barang bawaan saat berkunjung..

- d) Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Kegiatan dukungan layanan manajemen satker meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output dokumen RKA, laporan keuangan Satker, data kepegawaian melalui SIMPEG, dan laporan kegiatan.

- e) Layanan Perkantoran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melaksanakan layanan perkantoran dalam kurun 1 tahun anggaran (12 bulan) melalui kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran dan mobil dinas, pengadaan pakaian dinas, pembayaran tagihan daya dan jasa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, maka dilakukan berbagai upaya kedepan terhadap beberapa hal di masing-masing bidang, yaitu:

- a) Sub Seksi Pelayanan Tahanan

- 1) Perlunya peningkatan pembinaan Kepribadian dan kemandirian bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga agar dapat merubah sikap dan prilaku serta memperoleh ketrampilan untuk bekal setelah bebas, berguna di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

- 2) Perlunya dukungan saran dan prasarana yang tepat untuk mendukung pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga;
- 3) Perlunya penambahan petugas antara lain: dokter/mantri kesehatan/perawat kesehatan untuk mendukung tugas perawatan kesehatan WBP serta untuk petugas operator layanan kunjungan, informasi dan pengaduan; dan
- 4) Perlunya sosialisasi terhadap keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diusulkan CB, CMB dan PB, agar dapat menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan terutama soal surat jaminan, mengingat surat jaminan merupakan syarat mutlak.

b) Kesatuan Pengamanan

- 1) Dilakukan penguatan dan pemantapan terhadap tugas pengamanan (dilakukan penyegaran *rolling* regu 3 bulan sekali), mengingat tugas pengamanan terkesan bersifat monoton, dikhawatirkan melemah dan tingkat disiplinnya menurun;
- 2) Dilakukan secara berkelanjutan penyampaian aturan-turan tentang pelaksanaan tugas agar seluruh petugas pengamanan tetap mengedepankan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Dilakukan peningkatan pengawasan dan pengeledahan hunian blok, agar tercapainya deteksi dini barang-barang kategori larangan masuk ke blok; dan
- 4) Dilakukan peningkatan dan pelatihan dibidang teknis seperti menembak, bela diri, dan lain sebagainya.

c) Sub Seksi Pengelolaan

- 1) Perlu adanya sosialisasi/pendampingan dari eselon II Kantor Wilayah terkait dengan peraturan kepegawaian, SKP, penyusunan SPIP, LKjIP agar terjadi keseragaman dalam penyusunan laporan;
- 2) Perlunya evaluasi mengenai kewajiban masing-masing Sub Seksi untuk menyampaikan berkas arsip laporan kinerja, yang nantinya akan dijadikan dokumen arsip kantor;
- 3) Perlunya dukungan setiap usulan anggaran yang diajukan, agar dapat dialokasikan untuk mendukung program-program serta inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga;

- 4) Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia, mengingat jumlah pegawai yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sangat terbatas, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas;
- 5) Perlunya bimtek/sosialisasi aplikasi SIMPEG/SKP yang memadai untuk peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- 6) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana alat kantor dan mesin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga memperoleh anggaran sebesar Rp 5.861.837.000,-. Berikut rincian alokasi anggaran Rutan Kelas IIB Purbalingga T.A 2023 :

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.737.889.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.737.889.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.123.948.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.123.948.000,-

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran

Rincian per KRO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET		
				2022	2023	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	<i>Layanan Tahanan</i>					
	051	% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan Administrasi Tahanan yang cermat dan teliti	Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan	% Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan	100%	100%
			Pelayanan Pemberian Remisi, PB, CB, CMB CMK	% Pelayanan Pemberian Remisi, PB, CB, CMB CMK	100%	100%
			Pelayanan Penyuluhan Hukum	% Pelayanan Penyuluhan Hukum	100%	100%
			Rapat Koordinasi	% Rapat Koordinasi	100%	100%
	052	% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan Pembimbingan	Kegiatan Keagamaan	% Pelayanan Keagamaan	100%	100%
Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara			% Kegiatan Kesadaran Berbangsadan Bernegara	100%	100%	

		Kegiatan Tahanan yang cermat dan teliti	Kegiatan Kesenian dan Olah Raga	% Kegiatan Kesenian dan Olah Raga	100%	100%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	<i>Layanan Perawatan</i>					
	005	% Dukungan Operasional	Bahan Makanan Napi/Tahanan	% Bahan Makanan Napi/Tahanan	98%	99,98%
	051	% Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	Sandang	% Sandang	98%	100%
			Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	% Perlengkapan Tidur	95%	100%
			Pemenuhan Perlengkapan Mandi	% Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	95%	95%
			Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	% Perlengkapan Mandi	100%	100%
			Extra Fooding	% Pengolahan Limbah	98%	100%
			Pemulasaran	% Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	100%	0%
			Perawatan Kesehatan Napi /Tahanan diluar LP/Rutan	% Perlengkapan Medis Poliklinik	100%	100%
			Perlengkapan Medis Poliklinik	% Obat-obatan Bagi Napi/Tahanan	98%	98%
Seluruh unit kerja memenuhi standar Pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	<i>Layanan Keamanan dan Ketertiban</i>					
	051	Pencegahan keamanan dan ketertiban	Tanpa Komponen	% Tanpa Komponen	100%	100%
	052	Pengawasan	Pengawasan Narapidana	% Pengawasan Narapidana	95%	95%
Perpindahan (Mutasi) Narapidana			% Perpindahan (Mutasi) Narapidana	95%	95%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET		
				2022	2023	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi	<i>Layanan Dukungan Manajemen</i>					
	051	% Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan RKAKL	% Penyusunan RKAKL	100%	100%
	052	% Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Kinerja	% Penyusunan Laporan Kinerja	100%	100%

yang akuntabel			Reformasi Birokrasi	% Reformasi Birokrasi	100%	100%
	051	% Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Pengelolaan Sistem Akuntansi	% Pengelolaan Sistem Akuntansi	100%	100%
	052	% Pengelolaan Kepegawaian	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin	% Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin	100%	100%
	051	% Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Urusan Umum	% Urusan Umum	100%	100%
Pengelolaan SABMN Tingkat UAKPA			% Pengelolaan SABMN Tingkat UAKPA	100%	100%	
Administrasi Pengadaan Barjas			Administrasi Pengadaan Barjas	100%	100%	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	<i>Layanan Perkantoran</i>					
	001	% Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	% Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%
	002	% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kesehatan Pegawai	% Kesehatan Pegawai	100%	100%
			Pakaian Dinas	% Pakaian Dinas	100%	100%
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	% Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95%	95%
			Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	% Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100%	100%
			Pemeliharaan Kendaraan	% Pemeliharaan Kendaraan	95%	95%
			Langganan Daya dan Jasa	% Langganan Daya dan Jasa	95%	95%
			Jasa Pos dan Giro	% Jasa Pos dan Giro	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	
				2022	2023
		Keperluan Perkantoran	% Keperluan Perkantoran	96%	96%
		Konsultasi dan Koordinasi	% Konsultasi dan Koordinasi	100%	100%
		Jamuan Tamu	% Jamuan Tamu	100%	100%
		Honor Operasional Satuan Kerja	% Honor Operasional Satuan Kerja	100%	100%
		Penambahan Daya Tahan Tubuh	% Penambahan Daya Tahan Tubuh	95%	95%

Tabel 3-32 Rincian per KRO

Penetapan Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN
	(KEGIATAN)		2023	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	<i>Layanan Tahanan</i>			
	BDC.001.05 1	% Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan	100%	Rp1.000.000
		% pelayanan Pemberian CB dan CMB	100%	Rp11.350.000
	BDC.001.05 2	% pelayanan Kegiatan Agama	100%	Rp36.180.000
		%Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara	100%	Rp13.460.000
%Kegiatan Kesenian dan Olahraga		100%	Rp26.220.000	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi	<i>Layanan Perawatan</i>			
	BDC.004.00 5	% Bahan Makanan Napi /Tahanan	95%	Rp1.397.585.000
	BDC.004.05 1	% Kebutuhan Sandang	98%	Rp38.200.000
		% Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	98%	Rp44.544.000
		% Pemenuhan Perlengkapan Mandi	95%	Rp16.712.000
		% Perawatan Kesehatan Napi /Tahanan	100%	Rp7.661.000
		% Extra Fooding	100%	Rp28.650.000
		% Pemulasaran	100%	Rp1.000.000
		% Perawatan Kesehatan Napi /Tahanan diluar LP/Rutan	98%	Rp7.661.000
		% Perlengkapan Medis Poliklinik	95%	Rp53.632.000
% Penanganan dan Pencegahan Covid-19		95%	-	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	<i>Layanan Keamanan dan Ketertiban</i>			
	BHB.002.05 1	% Penegakan Keamanan dan Ketertiban	100%	Rp11.530.000
	BHB.002.05 2	% Pengawasan	100%	Rp8.550.000
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya	<i>Layanan Dukungan Manajemen</i>			
	EBA.956	% Layanan BMN	100%	Rp18.848.000
	EBA.958	% Layanan Hubungan Masyarakat	95%	Rp11.880.000
	EBA.962	% Layanan Umum	95%	Rp18.220.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN
	(KEGIATAN)		2023	
dengan administrasi	EBA.964	% Layanan Perkantoran	100%	Rp3.988.948.000
	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>			
	EBB.951	% Layanan Sarana Internal	100%	-
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>			
	EBC.954	% Layanan Manajemen SDM	100%	Rp21.200.000
	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>			
	EBD.952	% Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	Rp8.760.000
	EBD.953	% Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	Rp8.800.000
	EBD.955	% Layanan Manajemen Keuangan	100%	Rp9.760.000
	EBD.961	% Layanan Reformasi Kinerja	95%	Rp 37.532.000

Tabel 3-33 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Realisasi Tahun Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(KEGIATAN)		2023		(%)
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	<i>Layanan Tahanan</i>				
	BDC.001.05 1	% Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	100%	Rp1.000.000	100%
		% pelayanan Pemberian PB, CB, CMB, CMK	100%	Rp11.350.000	100%
	BDC.001.05 2	% pelayanan Kegiatan Agama	100%	Rp36.178.500	99,99%
		% Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara	100%	Rp13.400.000	99,55%
		% Kegiatan Kesenian dan Olahraga	100%	Rp26.220.000	100%
	<i>Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan</i>				
	BDC.004.00 5	% Bahan Makanan Napi /Tahanan	95%	Rp1.389.337.074,074	99,41%
	BDC.004.05 1	% Kebutuhan Sandang	100%	Rp38.200.000	100%
		% Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	100%	Rp44.544.000	100%
% Pemenuhan Perlengkapan Mandi		100%	Rp16.650.000	99,63%	
% Perawatan Kesehatan Napi/Tahanan		100%	Rp7.654.500	99,92%	
% Extra Fooding		100%	Rp28.635.000	99,95%	
	% Pemulasaran	100%	Rp0	0%	
BDC.004.05 2	% Perawatan Kesehatan Napi/Tahanan diluar LP/Rutan	98%	Rp7.654.500	99,92%	
	% Perlengkapan Medis Poliklinik	95%	Rp53.631.400	100%	

	% Penanganan dan Pencegahan Covid-19	95%	-	-
<i>Layanan Keamanan dan Ketertiban</i>				
BHB.002.05 1	% Penegakan Keamanan dan Ketertiban	100%	Rp11.519.900	99,91%
BHB.002.05 2	% Pengawasan	100%	Rp8.550.000	100%
<i>Layanan Dukungan Manajemen</i>				
EBA.956	% Layanan BMN	100%	Rp18.729.500	99,37%
EBA.958	% Layanan Hubungan Masyarakat	100%	Rp11.786.100	99,21%
EBA.962	% Layanan Umum	100%	Rp 18.162.700	99,69%
EBA.994	% Layanan Perkantoran	100%	Rp3.974.897.914	99,65%
<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>				
EBB.951	% Layanan Sarana Internal	100%	-	-
<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>				
EBC.954	% Layanan Manajemen SDM	100%	Rp21.175.000	99,88%
<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>				
EBD.952	% Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	Rp8.759.000	99,99%
EBD.953	% Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	Rp8.765.000	99,60%
EBD.955	% Layanan Manajemen Keuangan	95%	Rp9.755.000	99,95%
EBD.961	% Layanan Reformasi Kinerja	95%	Rp37.528.000	99,99%

Tabel 3-34 Realisasi Tahun 2023

Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

Tahun		Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
2022	Pagu	Rp3.551.379.000	Rp2.333.536.000	Rp100.000.000	Rp5.984.915.000
	Realisasi	Rp3.545.176.189	Rp2.321.592.952	Rp99.880.000	Rp5.966.649.141
	Capaian	99,83%	99,49%	99,88%	99,69%
2023	Pagu	Rp3.348.379.000	Rp2.513.458.000	-	Rp5.861.837.000
	Realisasi	Rp3.339.037.659	Rp2.492.705.207	-	Rp5.831.742.866
	Capaian	99,72%	99,17%	-	99,49%

Tabel 3-34 Realisasi Tahun Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya

Dari perbandingan alokasi anggaran tahun 2023 dengan tahun 2022 diatas, menunjukkan adanya kenaikan pada semua jenis belanja walaupun alokasi anggaran untuk tahun 2023 menurun dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran yang menunjukkan kenaikan ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2022 lebih baik dan lebih terserap 0,2% lebih banyak dibandingkan pada tahun 2023. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dapat

terlaksana dan terselesaikan lebih awal. Selain itu, koordinasi dan sinergi berjalan lebih baik dengan instansi internal, eksternal, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai SMART

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

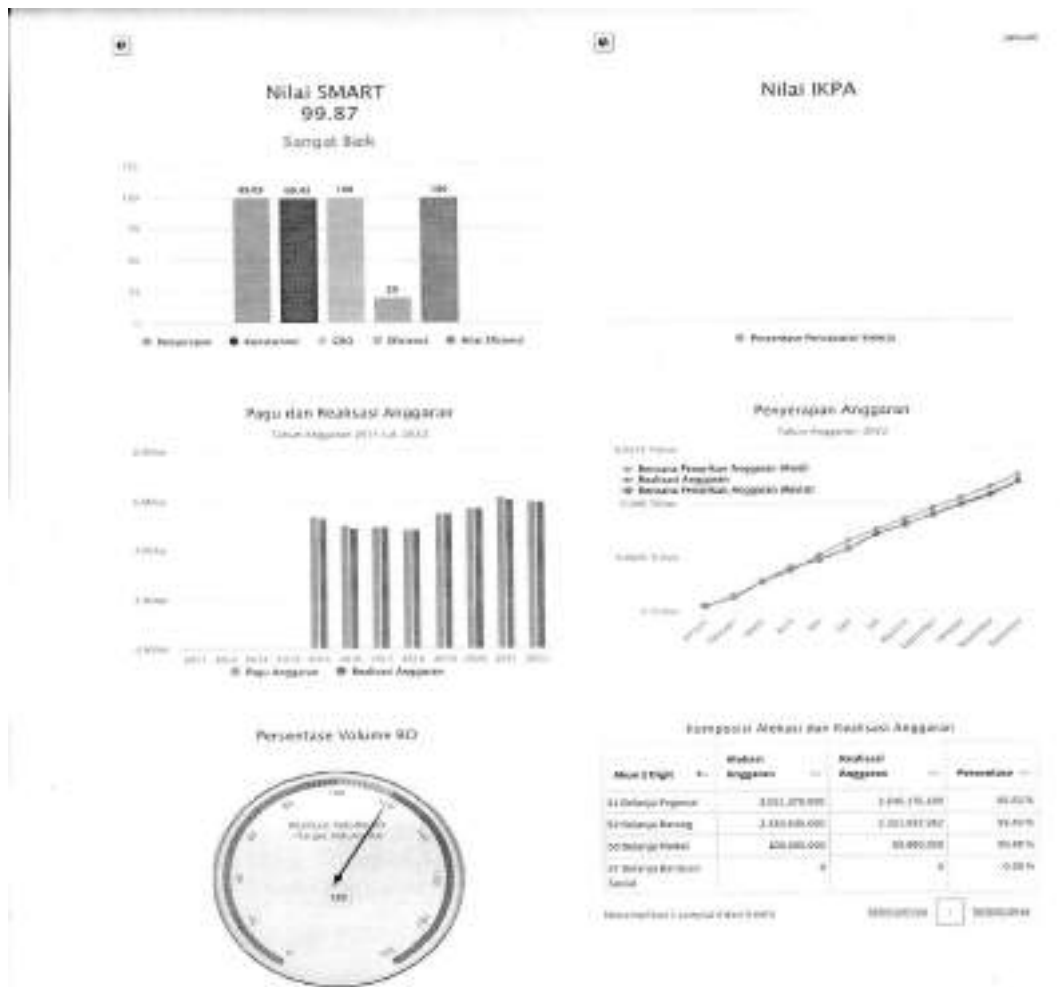
Aplikasi ini dibangun dengan sistem web-based, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan. Tutorial tahap I ini disusun untuk memudahkan pengguna/operator di tingkat Satuan Kerja pada kementerian negara/lembaga untuk memahami cara pengisian aplikasi SMART sehingga dapat melaporkan capaian kerjanya secara tepat waktu dan benar.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 100

Capaian : $99,87 / 100 \times 100 = 99,877$

Realisasi : $99,87100 \times 100 = 99,87$



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER- 4/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari

Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 100

Capaian : $98,02 / 100 \times 100 = 98,02$

Realisasi : $98,02/100 \times 100 = 98,02$

Hal ini disebabkan banyak faktor yang tidak mendapatkan nilai 100 pada masing-masing indikator sebagaimana pada gambar dibawah ini:


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Target Dengan DPMMSIB

No	Kode KPN	Kode DA	Kode Subkec	Unit/Sub Unit	Keterangan	Kondisi Pelaksanaan Anggaran		Kondisi Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Skor/ Bobot	Nilai Akhir (Nilai Teraih/Kemungkinan Dibiayai)	
						Persentase DIPA	Saldo Anggaran DIPA	Persentase Anggaran	Estimasi Realisasi	Perencanaan Tagihan	Pengeluaran SP- dan TUP	Dispendial 57%				Capaian DIPA
1	020	812	40492	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	Titik	100,00	88,82	27,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,02	100%	98,02
					Subsidi	92	92	20	10	10	10	5	20			
					RUMAH KARYA	10,00	5,49	19,33	10,00	10,00	10,00	5,00	20,00			
					Akasi Aspal	92,49			90,00				100,00			
Jumlah																

Dikumpulkan:
 Sesuai Pedoman Pelaksanaan PMS APRES2012, website RUMAH DA dan Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran @ Triwulan 2021

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-performance

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah menerapkan Aplikasi e-Performance Kemenkumham. E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Dari aplikasi e-Performance telah menunjukkan realisasi Perjanjian kinerja telah tercapai 100% dengan indikator warna hijau



2. Target Kinerja

- a. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

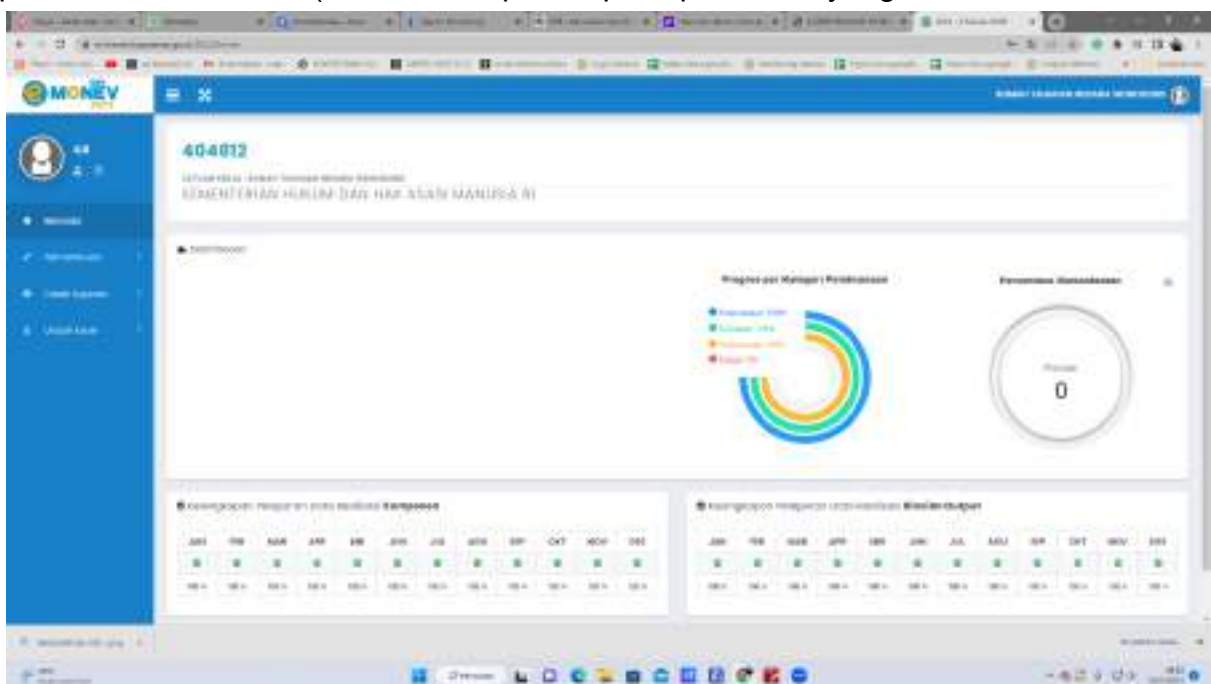
Indikator kinerja:

- ❖ Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
 - ❖ Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
 - ❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- b. Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yang efektif.
 - ❖ Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan Masyarakat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
 - ❖ Persentase layanan program layanan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yang diselesaikan.
 - c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan
 - ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
 - d. Meningkatnya produktivitas Narapidana/Tahanan menuju manusia mandiri dan siap bekerja.
 - ❖ Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah
 - e. Terwujudnya mantan Narapidana/Tahanan/Anak yang taat hukum.

- ❖ Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah
- f. Terwujudnya pemenuhan hak Anak
 - ❖ Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah
- g. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban
 - ❖ Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar
 - ❖ Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah salah satunya dengan pembentukan SATOPS PATNAL di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

3. E-monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh



Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan capture Aplikasi e-Monev Bappenas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2023.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020- 2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas.
- b. Prioritas Nasional II : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Prioritas Nasional III : Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
- e. Prioritas Nasional V : Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- g. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2018 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya jumlah petugas pengamanan;
2. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas;
3. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
5. Perbandingan antara kapasitas dan jumlah penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*.

B. Saran

1. Memaksimalkan penempatan pegawai sesuai dengan skill dan kompetensinya sehingga dengan minimnya jumlah petugas, tugas dan fungsi tetap berjalan optimal;
2. Aktif dalam mengikuti pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan secara mandiri oleh BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menjalin koordinasi pelatihan guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran terlebih pada anggaran yang dikeluarkan pada pemenuhan kebutuhan yang dapat dihasilkan dengan kreaatifitas baik pegawai maupun ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Menjaln kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang masih memungkinkan untuk ditambah kuota Warga Binaan Pemasyarakatan seperti Lapas Terbuka dalam rangka integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu asimilasi.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Purbalingga, 31 Desember 2023

Kepala,

Bluri Wijaksono

NIP. 197402081997031001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bluri Wijaksono
Jabatan : Pjt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 3 Januari 2022


Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002


Pihak Pertama,
Pjt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Purbalingga

Bluri Wijaksono
NIP. 197402081997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.643.805.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.643.805.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.755.448.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.755.448.000,-

Semarang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahrudin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IB, Pabalingga



W. Wijaksono
NIP. 197402081997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bluri Wijaksono, A.Md.I.P., S.H.

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. A. Yuspahrudin

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



Dr. A. Yuspahrudin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Purbalingga



Bluri Wijaksono, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 197402081997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.664.889.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.664.889.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.583.948.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.583.948.000,-

Semarang, 2 Januari 2023



 Pinak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian
 Hukum dan HAM Jawa Tengah

 Yuspahrudin
 NIP. 196305281985031002



 Pinak Pertama,
 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
 Purbalingga

 A. Md. I. P., S.H.
 NIP. 197402081997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bluri Wjaksono, A.Md.I.P., S.H.
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 2 Januari 2023


KEPALA
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Purbalingga
Bluri Wjaksono, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 197402081997031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PENG-21 /KPN.1408/2022

diberikan kepada:

RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA

Terbaik II

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022
Kategori Pagu dibawah 10 Miliar

Purwokerto, 13 Desember 2022
Kepala KPPN Purwokerto



HERBUDI ADRIANTO

HANBAL